



Pemerintah Jakarta Buka Lelang APTB

Organda siap dengan nilai minimum
Rp 12.500 per kilometer.

Nur Haryanto

anto@tempo.co.id

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih membuka peluang agar pengelola Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) bergabung dalam satu manajemen dengan PT Transportasi Jakarta yang mengawasi busway. "Lelangnya berupa tarif per kilometer," kata Basuki pada Rabu lalu.

Menurut Basuki, integrasi dengan Transjakarta diperlukan agar APTB tak beroperasi seenaknya. Selama ini, kata dia, Angkutan Perbatasan kerap *ngetem* untuk menunggu penumpang agar tagihan setorannya terpenuhi. Karena itu, ia melarang Angkutan masuk ke Jakarta. Setelah bergabung nanti, Basuki akan menerapkan aturan penggajian sopir angkutan.

Ketua Organisasi Angkutan Daerah Jakarta Shafruhan Sinungan akan meminta para pengelola Angkutan mengikuti lelang ini. Sinungan menyerahkan urusan tarif ini ke Transjakarta. "Besarnya berapa itu urusan Transjakarta, kami ikut sebagai peserta saja," katanya.

Menurut Sinungan, selama ini Organda dan pemerintah Jakarta tak pernah membahas harga per kilometer. Meski menyatakan tak ada masalah dengan harga berapa pun, kata Sinungan, perusahaan Angkutan akan ikut lelang jika harga minimumnya Rp 12.500 per kilometer.

Pembatasan Angkutan penyambung busway ini membuat khawatir banyak penumpang. Menurut Denny, warga Bekasi yang berkantor di Blok M, Jakarta Selatan, jika Angkutan hanya sampai di perbatasan, ia bisa berganti angkutan umum berkali-kali dan keluar ongkos banyak.

Dengan APTB, dari rumah ke kantornya dua jam, dan hanya sekali mengeluarkan ongkos ketika bersambung dengan Transjakarta. "Saya pilih APTB karena masuk busway. Kalau enggak, ya, apa bedanya sama bus yang lain?" kata Denny.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan pembatasan trayek APTB akan menyebabkan masyarakat makin tak nyaman menggunakan angkutan umum. Menurut Danang, tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat di perkotaan dengan berpindah-pindah tempat membutuhkan sarana dan transportasi yang memadai. "Saran radikalnya, memang harus ada penataan ulang terhadap seluruh trayek angkutan umum dan pengelolanya," ujar Danang.

Pengamat transportasi lainnya, Tri Cahyono, dari Universitas Indonesia, mengatakan APTB seharusnya bisa menjadi andalan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Sebab, sebagian besar pengguna kendaraan pribadi berasal dari kota penyangga, seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. "Pemerintah Jakarta dan kota sekitarnya semestinya menyepakati aturan jelas soal angkutan ini," tuturnya.

Tri mengatakan penumpang juga mesti terbiasa untuk membayar tarif yang sesuai dengan jarak tempuhnya. Menurut dia, wajar saja penumpang mengeluarkan ongkos tinggi jika tempat tujuannya memerlukan jarak tempuh yang jauh. "Kalau sekarang baru KRL saja yang menerapkan sistem tarif sesuai jarak tempuh, dan moda transportasi massal memang seharusnya begitu."

● LINDA HAIRANI | ERWAN HERMAWAN | AISHA SHAIDRA